

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu isu global yang paling kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya mencerminkan kekurangan dalam pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan partisipasi sosial yang layak. United Nations Development Programme (UNDP, 2024) menyatakan bahwa kemiskinan hambatan struktural terhadap pencapaian kesejahteraan manusia yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan lintas sektor, menyeluruh, dan berbasis bukti.

Sebagai salah satu tujuan utama dari Sustainable Development Goals, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas global yang diharapkan dapat tercapai melalui berbagai intervensi dan kebijakan yang tepat sasaran. Menurut UNDP (2024), keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada pemerataan hasil pembangunan yang adil dan inklusif. Hal ini menekankan betapa pentingnya mempromosikan kebijakan pembangunan yang memastikan semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam skala lokal, pemerintah daerah di Provinsi Riau perlu mempertimbangkan strategi-strategi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat untuk mengatasi kemiskinan secara efektif. Melalui implementasi kebijakan yang terfokus, diharapkan tingkat kemiskinan dapat dikurangi dengan dampak yang signifikan hingga tahun 2023. Pada akhirnya, sinergi antara kebijakan lokal dan komitmen internasional merupakan kunci untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengentaskan kemiskinan, meskipun telah banyak program intervensi yang dilaksanakan. Realitas ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi kesejahteraan yang merata.

Provinsi Riau, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, dan perkebunan kelapa sawit, menjadi contoh nyata paradoks antara potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan antar wilayah di Provinsi ini semakin menegaskan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 1. 1 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2014-2023

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	10.75	10.8	9.85	9.97	9.92	9.56	8.91	8.97	8.24	8.07
Indragiri Hulu	7.28	7.76	7.15	6.94	6.3	6.06	5.96	6.18	6.14	6.06
Indragiri Hilir	7.51	8.11	7.99	7.7	7.05	6.54	5.93	6.18	5.98	5.64
Pelalawan	11.15	12.09	11	10.25	9.73	9.62	9.16	9.63	8.97	8.15
Siak	5.22	5.67	5.52	5.8	5.44	5.03	5.09	5.18	5.07	5.23
Kampar	8.68	9.17	8.38	8.02	8.18	7.71	7.38	7.82	7.12	7.04
Rokan Hulu	10.13	11.05	11.05	10.91	10.95	10.53	10.31	10.4	9.95	9.72
Bengkalis	7.2	7.38	6.82	6.85	6.22	6.27	6.4	6.64	6.32	6.31
Rokan Hilir	7.28	7.67	7.97	7.88	7.06	7.01	6.72	7.18	6.73	7.07
Kepulauan Meranti	33.85	34.08	30.89	28.99	27.79	26.93	25.28	25.68	23.84	22.98
Pekanbaru	3.17	3.27	3.07	3.05	2.85	2.52	2.62	2.83	3.06	3.16
Dumai	4.83	5.26	4.74	4.57	3.71	3.56	3.16	3.42	3.2	3.21
RIAU	7.99	8.42	7.98	7.78	7.39	7.08	6.82	7.12	6.78	6.68

Sumber : BPS Provinsi Riau 2023

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau (2023), tingkat kemiskinan di Provinsi Riau menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,08%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 7,82% pada tahun 2020 sebagai awal pandemi COVID-19. Selanjutnya, angka tersebut menurun menjadi 7,12% pada tahun 2021, dan terus mengalami perbaikan pada tahun 2022-2023, masing-masing menjadi 6,78% dan 6,68%. Tren penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan secara makro dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat Provinsi.

Namun, jika dilihat secara spasial, terjadi disparitas signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat tingkat kemiskinan tertinggi selama periode tersebut, dengan angka mencapai 25,28% pada tahun 2020 dan hanya menurun menjadi 22,98% pada tahun 2023. Di sisi lain, Kabupaten Siak mencatat tingkat kemiskinan terendah, yakni sebesar 5,23% pada tahun 2023. Kabupaten Rokan Hulu juga menunjukkan angka relatif tinggi, yakni

9,72% pada tahun yang sama. Fakta ini menegaskan adanya ketimpangan kesejahteraan antar wilayah yang cukup lebar di Provinsi Riau.

Ketimpangan tersebut semakin diperburuk oleh dampak COVID-19, yang mulai melanda Indonesia pada awal tahun 2020 dan memberikan pukulan besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Pandemi menyebabkan terhentinya berbagai aktivitas ekonomi, terutama di sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tumpuan mata pencarian masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan, yang pada gilirannya meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah dengan struktur ekonomi yang belum terdiversifikasi.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan, seperti tingkat pengangguran, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian oleh Khurotul Ayuni et al (2023) di Jawa Timur, dan oleh Indah Maisyora (2022) di Jawa Tengah, menekankan pentingnya variabel pendidikan dan pengangguran sebagai penentu utama kemiskinan. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik membahas konteks daerah dengan karakteristik geografis dan ekonomi seperti Riau.

Mengingat bahwa tiap daerah memiliki kondisi sosial-ekonomi yang unik, maka analisis terhadap kemiskinan Provinsi Riau harus mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang khas. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah dalam literatur ilmiah dengan menyajikan analisis empiris mengenai determinan kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2014-2023.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih akurat, terarah, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di Riau. Dengan ini, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Khususnya tujuan pertama: "Menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di manapun."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan Pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau ?
2. Bagaimana hubungan Pendidikan Terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau ?
3. Bagaimana hubungan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau ?
4. Bagaimana hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengangguran dengan kondisi kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau.
3. Untuk menganalisis hubungan antara pendidikan dengan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau.
4. Untuk menganalisis hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota Provinsi Riau.

1.4 Manfaat

a. Secara teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ekonomi, khususnya dalam memahami hubungan antara pengangguran, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para akademisi dan peneliti yang bermaksud melakukan kajian serupa di wilayah atau konteks yang berbeda.

3. Penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam sektor ketenagakerjaan dan pendidikan.

b. Manfaat praktis

1. Memberikan rekomendasi berbasis data bagi pemerintah Provinsi Riau dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Memberikan wawasan bagi dunia usaha mengenai kondisi tenaga kerja dan tingkat pendidikan di Provinsi Riau, sehingga dapat membantu dalam pengambilan Keputusan terkait investasi dan rekrutmen tenaga kerja.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2014–2023. Objek penelitian mencakup 12 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, yaitu Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independennya meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta variabel dummy tahun 2020 sebagai representasi dampak pandemi Covid-19. Data penelitian berupa data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dalam bentuk data panel yang mengkombinasikan deret waktu (2014–2023) dengan data lintas wilayah (kabupaten/kota). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai determinan kemiskinan di Provinsi Riau serta menjadi dasar perumusan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berbasis bukti empiris.